

SAREKAT ISLAM (1912-1916): SEBUAH GERAKAN EKONOMI KERAKYATAN

Roni Tabroni

STKIP Pangeran Dharma Kusuma – STKIP-PDK Indramayu

Tabroni_r@rocketmail.com

Abstract: Artikel ini membahas tentang gerakan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Sarekat Islam antara tahun 1912 sampai tahun 1916. Penelitian dilakukan dengan cara melihat sumber-sumber primer tertulis berupa laporan-laporan residen dan berita-berita di surat kabar dan hasil-hasil penelitian tentang Sarekat Islam. Teori perilaku kolektif Smelser digunakan dalam penelitian ini untuk dapat membuat eksplanasi atas gerakan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Pendirian unit-unit kegiatan ekonomi dan unit-unit konsultasi ekonomi menjadi salah satu contoh kegiatan awal organisasi ini. Selain itu juga, mereka menjadikan uang-uang keanggotaan, infaq dan sedekah sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sarekat Islam pada permulaan kemunculannya bukanlah organisasi sosial politik seperti yang disangkakan beberapa peneliti gerakan ini melainkan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan.

Keywords: Sarekat Islam, Ekonomi Kerakyatan, Unit Kegiatan Ekonomi, Unit Konsultasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Sarekat Islam (SI) adalah sebuah perkumpulan yang diinisiasi oleh para pedagang.¹ Organisasi ronda *Reksoe Remoksoe* adalah cikal bakal perkumpulan yang berdiri pada tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta ini.² Anggota perkumpulan ini, sesuai dengan anggaran dasar tahun 1912, ialah semua orang yang menganut agama Islam dan telah mencapai usia delapan belas tahun.³ Hal inilah yang kemudian menyebabkan perkumpulan ini mempunyai anggota yang begitu banyak. Jumlah anggota perkumpulan ini pada dua tahun berdirinya berjumlah lebih dari satu juta orang (Korver, 1985: 222; Shiraishi, 2005: 64).

Banyak hal yang bisa dilihat dari perkumpulan ini, salah satunya adalah gerakan ekonomi mereka. Untuk melihat gerakan ekonomi dalam SI kita harus melihat beberapa

¹ Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhoedi. Seorang pedagang batik dari Lawean Surakarta.

² Rinkes menyebut bahwa tanggal berdirinya tidak lama setelah bulan Februari tahun 1912 (Van der Wal, 1967: 86-87). Residen Surakarta dalam laporan pertamanya tentang Sarekat Islam pada 11 Agustus 1912 menulis bahwa gerakan ini didirikan pada bulan sebelum itu (Van der Wal 1967: 85). Hal ini bertentangan dengan penulis-penulis yang muncul setelahnya yang menyebut tahun 1911 sebagai tahun didirikannya Sarekat Islam (di antaranya Van Niel, 1970: 90 dan Noer, 1973: 102).

³ Anggaran Dasar SI dapat dilihat dalam lampiran 2, Pasal 3 laporan Konggres tahun 1914.



transformasi yang dialami oleh perkumpulan ini. Transformasi-transformasi inilah yang kemudian menentukan kebijakan ekonomi mereka. Transformasi yang pertama adalah perubahan gerakan dari kegiatan ronda dan boikot menjadi mobilisasi massa setelah turunnya perintah Residen Surakarta pada 10 Agustus 1912. Mobilisasi masa ini terutama didukung oleh surat kabar dan *vergadering*. Kedua hal inilah yang kemudian memunculkan kebijakan ekonomi awal mereka. Usaha percetakan surat kabar dan pengelolaan *vergadering* menjadi kegiatan ekonomi SI pada transformasi pertama ini.

Perintah residen dan mobilisasi masa yang didukung oleh surat kabar dan *vergadering* menyebabkan SI berkembang di luar Karisidenan Surakarta. Dalam kurun waktu kurang dari setahun gerakan ini kemudian mewabah di Jawa dan Madura. Perluasan SI kemudian menumbuhkan pusat-pusat SI yang baru di wilayah perkotaan dan membawa perubahan dalam hal organisasi maupun kepemimpinannya. Inilah transformasi kedua dari perkumpulan ini. Kepemimpinan dan hal organisasi menjadi titik tekan dalam gerakannya. Kepemimpinan bisa dilihat dari para pemimpin-pemimpin cabang yang bervariasi. Mereka pada umumnya terdiri atas priyayi pemerintah, orang partikuler, pedagang bumiputra muslim, dan beberapa kiai. Di cabang-cabang yang didominasi priyayi pemerintah dan para partikuler, kemajuan kegiatan dagang amat ditekankan (Shiraishi, 2005, p. 87).

Selain itu, tumbuhnya pusat-pusat SI ini memunculkan sebuah kekuatan dalam hal permodalan. Di sinilah kemudian muncul sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya puluhan toko-toko koperasi di berbagai tempat SI lokal berada, berdirinya usaha-usaha dagang, percetakan, dan usaha-usaha lainnya yang semuanya dikelola oleh anggota SI. Walaupun hanya bertahan tidak sampai empat tahun, gerakan ekonomi mereka adalah sebuah contoh bagaimana ketika rakyat bisa dimobilisasi untuk berdaulat secara ekonomi maka yang menikmati adalah rakyat itu sendiri.

Bagaimana usaha-usaha ekonomi yang begitu masif ini kemudian mengalami pahitnya kegagalan, badan-badan usaha yang bersemi di awal gerakan kemudian tidak terlalu lama menjadi bangkrut merupakan lahan penelitian yang belum ditemukan jawabannya. Selain itu, gerakan ekonomi kerakyatan SI ini juga dapat membuktikan bahwa pada awal kemunculannya SI bukanlah organisasi politik seperti disangkakan beberapa peneliti SI tetapi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Apa yang bisa kita ambil sekarang dari kegagalan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka untuk kita jadikan pelajaran dalam mengambil kebijakan ekonomi di masa yang akan datang merupakan tujuan ditulisnya artikel ini.

KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI SI (1912-1916)

Kegiatan ekonomi SI yang paling menonjol dalam periode awal adalah pendirian koperasi-koperasi konsumen. Para anggota dianjurkan mengumpulkan uang untuk membentuk toko-toko koperasi, agar mereka dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan murah. Kegiatan ekonomi kerakyatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan para anggotanya. Kegiatan ini dibagi menjadi empat jenis; *pertama*, meningkatkan semangat dagang dan kepentingan materiil rakyat Indonesia dalam lapangan dagang, kerajinan dan pertanian. Hal pertama yang dilakukan untuk



mencapainya adalah dengan mendirikan koperasi konsumen dan badan usaha-usaha lainnya.

Ini bisa dibuktikan dengan berdirinya toko-toko koperasi oleh perkumpulan ini antara tahun 1913 sampai 1914 di banyak tempat di Indonesia. Contohnya di Surabaya, pada pertengahan tahun 1913, terdapat lebih dari sepuluh toko dan warung koperasi. Banyak anggota yang hanya berbelanja di sini.⁴ Contoh lain bisa dilihat di Surakarta pada tahun yang sama telah berdiri dua toko untuk menjual kebutuhan sehari-hari, untuk berdagang beras dan berdagang bahan bakar serta proses pembentukan dua toko dan sejumlah tukang jahit pakaian. Modalnya berbeda-beda, dari 300 gulden sampai 5.000 gulden. Modal ini dikumpulkan dengan mengeluarkan saham sebesar satu sampai lima gulden. Di daerah ini juga dilakukan ceramah-ceramah soal ekonomi pada rapat-rapat SI.

Selain toko-toko koperasi, SI juga berusaha mendirikan badan-badan usaha yang lebih besar. Seperti pada tahun 1913, pimpinan SI pusat merencanakan untuk mendirikan perusahaan bank dan asuransi, serta perusahaan impor dan ekspor. Usaha ekspor dan impor dimaksudkan untuk menyaingi kantor dagang Eropa dan Cina. Untuk usaha ini diharapkan akan terkumpul modal sejumlah setengah sampai satu juta gulden. Pada perjalanannya ke seluruh Jawa, Tjokroaminoto sibuk mempropagandakan rencana ini.⁵ Usaha ini mulai menampakkan hasilnya ketika di Pasar Gede, Yogyakarta dibentuk sebuah perusahaan yang membuat perjanjian kredit dengan Dinas Urusan Kredit Rakyat yang mana pembentuknya adalah sejumlah saudagar yang hampir semuanya anggota SI (van der Wal: 1967: 352, 428). Di SI Bogor pada tahun 1914 ada rencana untuk membentuk suatu NV guna melakukan perdagangan, melaksanakan proyek-proyek bangunan dan eksploitasi barang yang tidak bergerak.⁶ Di SI Banyumas ada sebuah rencana pembentukan usaha dagang dalam bidang tekstil dan tembakau.⁷ Di Temanggung ada rencana untuk mendorong hasil pertanian, terutama tembakau untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina.⁸ Di Kudus sebuah percetakan didirikan akhir tahun 1913 dan didirikan pula sebuah perkumpulan dagang.⁹ Di Madiun hal serupa juga dilakukan.¹⁰ Di Surabaya dan Bangil juga merencanakan untuk mendirikan perkumpulan dagang pada awal tahun 1913.¹¹ Di Bengkulu didirikan suatu perusahaan pengangkutan, untuk ini disediakan sebuah garasi bersama bengkel reparasi, dan membeli lima truk. Dengan kendaraan ini dibuka dinas angkut barang secara teratur di daerah-daerah yang berbatasan. Mobil-mobilnya dicat merah dan dipasangi lencana Islam berupa bulan sabit dan bintang.¹² Kemudian dibuka warung dan membeli perusahaan tekstil seharga 4000

⁴ Lihat POKT 2 (1913); 1468; di sini disebutkan jumlahnya 12. *De Indische Gids* (35(1913)650-651) menyebutkan untuk Maret 1913 ada enam. Tjokroaminoto menyebutkan di kongres Surabaya, Maret 1913, berjumlah 17, lihat Vb. 9-8-13-B13.

⁵ Lihat *Oetoesan Hindia*, dalam POKT 2 (1913) 1204, 1468.

⁶ Lihat laporan Asisten residen Bogor kepada residen Jakarta, 7-6-1914, Vb. 8-3-16-50

⁷ Nota bupati Banyumas dalam Vb 8-3-16-50, 9.

⁸ Residen Kedu kepada Gubernur Jenderal, 31-5-1913, Vb. 9-8-13-B13. Lihat juga bab VIII, catatan 147.

⁹ Mr. 1390/14

¹⁰ Memori Penyerahan Residen Madiun, mr. 552/14

¹¹ Residen Surabaya pada Gubernur Jenderal, 19-5-1913, Vb. 9-8-13-813 dan *Indische Gids* 35 (1913) 650-1

¹² Laporan Frijling dan Clignet, 28-5-1915, hal. 48-51, dan laporan Residen Bengkulu dalam mr. 176x/18.



gulden. Kemudian juga direncanakan untuk memborong pajak-pajak ikan dan gadai serta mendirikan perusahaan sepatu yang mana para tukangnyanya akan didatangkan dari Jawa. Di daerah Muara Enim, Palembang, perkumpulan SI telah melakukan pembelian sebuah kapal motor dan sebuah mobil untuk disewakan.¹³ Di Kotabaru, distrik Lampung, perkumpulan ini merencanakan membentuk dinas truk. Kemudian pada tahun 1915, perkumpulan ini berhasil mendirikan sebuah perkumpulan dagang yang dinamakan *Hakul Muslimin*, dengan modal saham hampir 30.000 gulden.¹⁴ Di daerah Sukadana dan Tulangbawang, perkumpulan ini juga berhasil mendirikan perkumpulan dagang. Terakhir di daerah Kalimantan Tenggara perkumpulan SI berhasil mendirikan sebuah perusahaan dagang dengan modal 26.000 gulden pada tahun 1915. Di daerah ini juga, SI berhasil membeli sebuah kapal uap untuk pelayaran pantai sungai.¹⁵

Selain kegiatan ekonomi kerakyatan, perkumpulan SI juga berusaha memberikan edukasi dan solusi kepada rakyat Hindia-Belanda dalam bidang keuangan dan ekonomi (Korver, 1985: 89). Edukasi dan pemberian solusi ini didasari oleh berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat dibedakan antara keluhan di bidang keuangan dan ekonomi terhadap pemerintah dan keluhan di bidang keuangan dan ekonomi terhadap lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta. Keluhan di bidang keuangan dan ekonomi terhadap pemerintah adalah mengenai pajak dan kerja rodi. Keluhan di bidang keuangan dan ekonomi terhadap lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta terutama menyangkut industri gula dan tanah partikelir di Jawa.

Keluhan mereka terhadap perusahaan gula disebabkan tekanan perusahaan-perusahaan gula yang memaksa para petani untuk menyewakan tanah mereka dengan tarif yang rendah. Ini bisa dilihat dari surat permohonan Tjokroaminoto pada Gubernur Jenderal bulan Desember tahun 1915 yang berisi tentang keluhan penduduk desa yang seperti dipaksa oleh kepala desa dan kecamatan untuk menyerahkan sawah mereka kepada pabrik-pabrik gula. Mereka membela kepentingan-kepentingan pabrik, hingga rakyat menganggap mereka sebagai agen perkebunan.¹⁶ Kemudian dalam sebuah artikel di *Oetoesan Hindia*, bulan September tahun 1914, menyebutkan bahwa pejabat yang tidak mau disogok oleh para pengusaha perkebunan berkali-kali dipindahkan dan ada kalanya malah dipecat.¹⁷

Setelah menampung dan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, SI kemudian berusaha untuk menyadarkan rakyat akan haknya untuk bebas mengadakan perjanjian sewa. Seperti contoh pada kongres Bandung terdapat usulan yang dilakukan oleh cabang Wlingi dan Pekalongan untuk melarang kontrak-kontrak yang masanya bertahun-tahun lamanya. Pada konggres itu juga dibicarakan usul untuk memohon kepada pemerintah agar ketika terjadi penandatanganan kontrak antara rakyat dan pengusaha perkebunan, pengurus SI diwajibkan hadir sebagai kuasa rakyat desa.¹⁸ Usaha-usaha ini menampakkan hasil yang signifikan. *Oetoesan Hindia* memberitakan

¹³ Lihat POKT 4 (1915) 1385

¹⁴ Lihat laporan Frijling dan Clignet, 89.

¹⁵ Lihat POKT 4 (1915) 1251

¹⁶ Vb. 12-5-16-12, 12-13.

¹⁷ Lihat POKT 3 (1914) 1680

¹⁸ Lihat laporan Kongres, 38-39.



bahwa pada bulan Februari 1914, harga sewa sudah banyak sekali naik di cabang tertentu di Jawa Timur.¹⁹ Selain itu, sebuah Koran Cina memberitakan dalam tahun 1916, rakyat di daerah Blitar yang dipengaruhi SI sudah meminta harga sewa yang jumlahnya enam belas kali lipat harga lama.²⁰

Selain harga sewa keluhan lain yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan swasta adalah mengenai pembagian air irigasi antara rakyat dan perkebunan tebu. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah rapat SI di Blitar pada bulan Juli tahun 1915 yang mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan peraturan lain mengenai pembagian air irigasi.²¹ Usul cabang Blitar ini didukung oleh banyak cabang lain di Jawa.²² Usulan-usulan demikian juga diajukan di kongres Bandung.²³

Selain kegiatan ekonomi kerakyatan dan edukasi dalam bidang ekonomi dan keuangan, SI juga memiliki kegiatan ekonomi lain yaitu menjadikan uang pangkal dan iuran serta sumbangan para anggotanya sebagai sumber pendapatan. Pada Anggaran Dasar SI September 1912 menetapkan bahwa para anggota baru SI diwajibkan membayar uang pangkal satu kali; sekurang-kurangnya tiga puluh sen.²⁴ Di beberapa tempat, selain uang pangkal, orang juga harus membayar sejumlah tertentu, yang dimaksudkan sebagai hadiah kepada anggota pengurus atas jerih payah mereka. Di Palembang dan Jambi hadiah ini besarnya sepuluh sen.²⁵ Di cabang Jatinegara, daerah Jakarta, orang menamakan uang masuk itu sendiri sebagai hadiah.²⁶

Selain kewajiban keuangan berupa uang pangkal, anggota juga diwajibkan untuk memberi bantuan kepada sesama anggota yang ditimpa kesulitan. Bantuan uang yang diberikan ditetapkan menurut kemampuan masing-masing. Satu sen sehari untuk mereka yang cukup mampu sampai sepuluh sen untuk mereka yang kaya. Mereka yang tidak mampu tidak perlu menyumbang sama sekali. Oleh karena sifatnya *ad hoc*, dan tidak cocok untuk organisasi besar seperti SI, sumbangan ini pun tidak bertahan lama. Hal itulah yang kemudian menginspirasi *Central Comite* untuk melakukan penarikan iuran secara teratur. Para anggota perkumpulan lokal kemudian membayar iuran secara berkala²⁷ dan cabang-cabang pada gilirannya akan menyerahkan sebagian iuran untuk kas CSI.

Selain menetapkan penarikan iuran yang teratur, hal lain yang dilakukan *Central Comite* adalah meminta perusahaan – yang erat hubungannya dengan SI seperti Setia Usaha N.V.- agar menyeter sebagian keuntungannya untuk kas SI (van der Wal: 1967:

¹⁹ Lihat POKT 3 (1914): 812

²⁰ Lihat POKT 5 (1916): 1671

²¹ Lihat POKT 4 (1915): 1679

²² Permohonan Tjokroaminoto, 23-12-1915, Vb. 12-5-16-12, 19.

²³ Laporan Kongres, 47-48.

²⁴ Lihat Lampiran 2 Pasal 6 dalam 1912 atau 1913 *Central Comite* menentukan bahwa anggota-anggota pengurus setempat boleh menahan sebagian dari uang pangkal – lima persen – untuk diri sendiri (Rinkes dalam Van der Wal 1967: 212)

²⁵ Lihat laporan Frijling dan Clignett, 4 dan 15.

²⁶ Residen Jakarta, 23-5-1913, Vb. 9-8-13-B13

²⁷ Dalam anggaran dasar perkumpulan-perkumpulan setempat sesudah 1913, kemudian dimuat pula ketentuan bahwa anggota, kecuali uang masuk juga harus membayar iuran. Lihat Vb. 28-7-17-28



212). Selain itu juga pada tahun 1913, uang pangkal dinaikkan menjadi satu gulden.²⁸ SI juga berusaha mengumpulkan uang dengan menaikkan uang langganan surat kabar-surat kabar SI, biaya masuk dan sumbangan lainnya yang dipakai untuk mendukung para pemimpin yang kebanyakan adalah jurnalis (Shiraishi, 1997: 81). CSI mempunyai dua sumber keuangan: 10 persen dari pendapatan yang diperoleh SI lokal selama enam bulan setelah berdiri dan dari sumbangan anggota, terutama pada saat diselenggarakannya kongres dan *vergadering*.

KEGAGALAN GERAKAN EKONOMI KERAKYATAN SI (1912-1916)

Sumber kegagalan kegiatan ekonomi Sarekat Islam adalah tidak adanya pengetahuan ekonomi para pemimpinnya, manajemen keuangan yang buruk, terlalu mudah memberikan kredit, langkanya modal dan hanya sedikit distribusi. Kadang-kadang ditemukan juga korupsi dan penyelewengan.²⁹

Iuran yang diwajibkan untuk para anggota SI menjadi awal perselisihan di dalam tubuh perkumpulan tersebut. Banyak cabang-cabang SI yang menolak menyerahkan keuangan kepada kas pusat. Seperti contohnya, Goenawan yang menolak menyerahkan uang yang dipungutnya di Sumatera Selatan untuk CSI dan menahan untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, hal utama yang menyebabkan tindakan-tindakan keuangan ini menemui kegagalan adalah tidak adanya kedisiplinan dari para anggotanya. Selain itu juga, ketiadaan kader SI yang mampu mengelola keuangan dengan baik juga bisa menjadi alasan kegagalan keuangan SI ditambah tidak adanya sistem iuran yang baik. Di sini bisa dilihat SI gagal membangun dasar keuangan yang kuat. Kegagalan inilah yang menyebabkan kegagalan-kegagalan yang lain seperti matinya toko-toko yang muncul begitu antusias di awal berdirinya sampai kegagalan dalam merealisasikan program-program dikarenakan tidak adanya manajemen keuangan yang baik.

Ketiadaan dasar keuangan yang baik ini juga membuat nama baik SI menjadi buruk berkat adanya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan para pemimpin SI. Ini bisa dilihat misalnya dalam harian *Kaoem Moeda* yang erat hubungannya dengan SI. Pada bulan Maret 1914, harian tersebut mendesak untuk diadakan tuntutan hukum terhadap *Central Comite*. Pimpinan disalahkan karena tidak cukup memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan keuangan.³⁰ Terlalu banyak uang dikeluarkan untuk perjalanan beberapa anggota.³¹ Selain itu, pada akhir tahun 1915,

²⁸ Ibid dan selanjutnya mr.490/13; Residen Kedu 31-5-1913, Vb. 9-8-13-B13; Frijling dan Clignet: 4, 38, 43, 75, 77, dan 83. Di beberapa cabang SI diharuskan jumlah yang lebih tinggi dari satu sampai tiga gulden, bergantung kepada daya kesanggupan anggota yang masuk. Lihat misalnya Bupati Tuban 2-5-1913, Vb. 5-12-13-61; Residen Madiun 29-3-1913, Vb. 26-6-13-62

²⁹ Lihat Rinkes dalam Van Der Wal, 1967: 427-8; Asisten residen Indramayu kepada Gubernur Jenderal 30-11-1914, Vb. 8-3-16-50; Residen Rembang kepada Gubernur Jenderal 13-4-1913, Vb. 9-8-13-B13; Residen Surakarta kepada Gubernur Jenderal, 24-5-13, Vb. 9-8-13-B13 dan laporan Frijling dan Clignett, mr. 1738/15, 107.

³⁰ POKT 3 (1914): 805

³¹ POKT 3 (1914): 1676-1677



Tjipto mengekspos penyelewengan uang SI oleh Goenawan sebanyak 60.000 gulden dan menyerangnya sebagai satria maling.³²

Hal ini membuat masyarakat menjadi tidak antusias seperti saat pertama kali munculnya SI. Ini mengakibatkan jumlah sumbangan menurun yang berarti sumber pendapatan SI juga berkurang. Satu-satunya jalan untuk menghidupi CSI adalah dengan mendirikan SI-SI lokal yang baru dan mengumpulkan uang dari mereka. Tjokroaminoto terus menerus berkeliling Jawa, mengadakan *vergadering* di tempat-tempat barudan mendirikan SI-SI lokal yang baru. SI lokal terus bermunculan di Jawa dan Sumatera. Di Jawa saja, 92 SI lokal didirikan pada akhir tahun 1916. (Shiraishi, 1997: 104) Tetapi, ini sebenarnya perluasan yang palsu karena sementara SI lokal yang baru terus didirikan, banyak SI lokal yang lama tidak berkembang dan kadang-kadang bahkan macet tanpa kegiatan.³³ Pada akhir 1916 pembentukan SI-SI lokal di Sumatra juga berhenti dan dananya juga berhenti mengalir ke CSI.³⁴

Selain penyebab-penyebab di atas, bentrokan langsung mereka dalam bidang ekonomi dengan etnik Tionghoa juga turut memberi andil dalam kegagalan gerakan ekonomi SI. Mengenai bentrokan perkumpulan SI dengan Tionghoa bisa merujuk pada kejadian-kejadian pada awal berdirinya SI. Pada tahun 1912, pada awal berdirinya SI, kegiatan dagang Tionghoa sudah semakin hebat dan pemogokan pasar Tionghoa Surabaya pada tahun tersebut memperlihatkan kekuatan mereka pada bumiputra. Segera setelah pemogokan terjadi, *Sie Dhian Ho*, sebuah firma yang bergerak sejak tahun 1902 pada bidang alat tulis dan menerbitkan surat kabar Melayu-Tionghoa, *Taman Pewarta*, serta terjun dalam perdagangan batik,³⁵ bersama firma Tionghoa lainnya mencoba menekan harga kain batik bumiputra di Lawean. Sebagai balasannya, di bawah pimpinan Martodharsono para pedagang ini melakukan boikot terhadap *Sie Dhian Ho*. Seiring dengan boikot, perkelahian jalanan antara anggota SI dan orang-orang Tionghoa pun semakin meningkat.

Orang-orang Tionghoa kebanyakan adalah lintah darat dengan rakyat desa sebagai pengutangannya. Ketegangan terjadi ketika rakyat desa yang merasa didukung oleh SI menunjukkan sikap mengancam ketika dilakukan penagihan.³⁶ Selain itu ketegangan juga dipicu oleh praktek dagang kongsi yang dilakukan para pengusaha Tionghoa ketika memborong hasil pertanian. Dengan janji dan bentuk kerja sama yang lebih erat, para pedagang Tionghoa dapat menekan harga barang-barang, sementara harga barang impor, seperti bahan katun dan minyak tanah, dijadikan membumbung oleh mekanisme yang sama.³⁷ Persaingan antara toko-toko SI dan toko-toko pedagang Tionghoa juga merupakan salah satu sumber ketegangan. Sebagai contoh adalah ketegangan yang terjadi di Bulu. Pimpinan SI di sana mendirikan sebuah toko tepat di depan toko

³² Lihat Tj. Mk. (Tjipto Mangoenkoesoemo), "He Pemaling! Djahanam! Manakah moeka kamoe? Manakah mintasraja kamoe?" *Sarotomo*, 1915, 261-264.

³³ *Missive van den Adviseur voor Inlandsche Zaken*, 30 Nov 1915, Mr. 1263/16, Vb. I Sept 1917 no.33

³⁴ Tentang posisi keuangan CSI, lihat *Proces Verbaal* (Tjokroaminoto), Mr. 184x/21

³⁵ Pramoedya Ananta Toer, "Sepatah Kata Perkenalan," dalam *Tempoe Doeloe*, ed. Pramoedya Ananta Toer (Jakarta: Hasta Mitra: 1982), 8.

³⁶ *Residen Jakarta*, 16-2-1913, Vb. 22-8-13-26

³⁷ Mr. 2059/13; *Residen Rembang*, 18-4-1913, Vb. 9-8-13-B13



Tionghoa. Terjadilah persaingan sampai timbul permusuhan yang mengakibatkan pemilik toko Tionghoa pindah ke Lasem dan tokonya dirampok.³⁸

Selain adanya persaingan dengan etnik Tionghoa, kegiatan ekonomi SI juga menemui titik buntu karena adanya intervensi dari para pegawai administrasi pemerintah. Hal ini dimulai ketika muncul keputusan pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 30 Juni 1913 tentang pemberian pengakuan hukum bagi SI-SI yang didirikan di tingkat lokal yang membatasi wilayah kegiatannya pada daerah tertentu (Shiraishi, 1997: 96). Sejak adanya keputusan tersebut, penguasa setempat terus ikut campur dalam urusan-urusan SI, bermain curang dalam pemilihan *afdeling bestuur*, menuntut agar *afdeling* menyertakan daftar anggota, menuntut adanya pengelolaan dana SI yang baik dan mengalihkan aktivitas SI dari *vergadering* menjadi aktivitas yang lebih tenang seperti mendirikan toko-toko SI (Shiraishi, 1997: 96). Pegawai-pegawai administrasi mulai mengganggu SI, dengan cara intervensi dalam pemilihan kepemimpinan SI lokal dan pengelolaan dana SI, menekan priyayi pemerintah agar keluar dari SI dan menangkap anggota-anggota SI dengan tuduhan-tuduhan sepele.³⁹

SIMPULAN

Gerakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Sarekat Islam pada awal berdirinya pada tahun 1912 disambut antusias oleh para anggotanya. Ini bisa dilihat dari berdirinya puluhan toko-toko koperasi, bermunculannya badan-badan usaha seperti perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank. Selain itu, gerakan ekonomi kerakyatan mereka yang mewujudkan dalam penarikan uang keanggotaan, iuran dan sumbangan telah juga menggemukkan kas SI pusat. Edukasi dan solusi di bidang ekonomi dan keuangan membuat masyarakat semakin simpati terhadap gerakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan perkumpulan ini. Akan tetapi, kemudian masalah mulai bermunculan, seperti ketidakdisiplinan anggota dalam membayar iuran menjadi awal hancurnya gerakan ekonomi kerakyatan ini. Buruknya manajemen keuangan, penyelewengan dan korupsi, pertikaian dengan etnik Tionghoa dan intervensi para pegawai administrasi pemerintah membuat gerakan ekonomi kerakyatan SI hancur berantakan. Semua penyebab tersebut membuat kegiatan ekonomi kerakyatan SI yang begitu antusias dan masif pada awalnya menjadi lemah dan semakin melemah hanya dalam kurun waktu empat tahun sejak awal berdirinya.

Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari gerakan ekonomi kerakyatan SI di awal berdirinya. Manajemen keuangan yang baik adalah hal yang wajib dipunyai oleh suatu perkumpulan yang ingin mencanangkan gerakan ekonomi kerakyatan. Selain itu, integritas para pemimpinnya juga menjadi keharusan untuk menghindari penyelewengan dan korupsi. Akhirnya, yang paling penting dari semuanya adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan mereka yang berencana mencanangkan gerakan ekonomi kerakyatan tersebut. □

³⁸ Mr. 2059/13

³⁹ Lihat kasus Meester Cornelis dalam Mr. 2030/15





DAFTAR PUSTAKA

- Berg, N.P. van den. 1895. *The Financial and Economy Condition of Netherlands India since 1870*. The Hague.
- Creutzberg, P. ed. 1972-1975. *Het ekonomisch beleid van Nederlandsch-Indie; Capita selecta; Een bronnenpublicatie*. Groningen.
- Furnivall, J.S. 1939. *Netherlands India: A Study in Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Helfferrich, Em. 1914. *Die Niederlandisch Indischen Kulturbanken*. Jena.
- Kamerling, R.N.J. (ed.) 1988. *Indonesia toen en nu*. Amsterdam.
- Korver, A.P.E. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Diterjemahkan oleh grafitipers. Jakarta: grafitipers.
- Lindbald, J. Thomas. ed., 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Diterjemahkan oleh Arief Rohman dan Bambang Purwanto. Jakarta: LP3ES.
- Niel, Robert van. 1970. *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*. 's- Gravenhage.
- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Singapore: Oxford University Press.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*. Diterjemahkan oleh Hirmar Farid. Jakarta: Grafiti.
- Toer, Pramodya Ananta. ed. 1982. "Sepatah Kata Perkenalan," dalam *Tempoe Doeloe*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Wal, S.L. van der. 1967. *De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands Indie. Een Bronnenpublicatie*. Werk door Groningen.

